



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya(A.Md)  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**IHKSAN NOVRI YASNIK**  
**01770615111**



**UIN SUSKA RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

NAMA : IHKSAN NOVRI YASNIK  
 NIM : 01770615111  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Pekanbaru, 15 Desember 2020

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Irien Violinda Anggrani, SE, M.Si  
 NIP. 19751106 200710 2 003

**MENGETAHUI**

**DEKAN**



Dr. Drs. H. Mah. Said HM, M.Ag. MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA PRODI**

Sahwitri Tyandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : IHKSAN NOVRI YASNIK  
 NIM : 01770615111  
 PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
 TANGGAL UJIAN : 13 November 2020

Pekanbaru, 2 Desember 2020

Disetujui Oleh :

**KETUA PENGUJI**

**Shawitri Triandani, SE, M.Si**  
**NIP: 19820806 200604 2 002**

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

**Khairil Henry, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19751129 200801 1 009**

**PENGUJI II**

**Afrizal, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19690419 200701 1 025**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**OLEH**

**IHKSAN NOVRI YASNIK**

**NIM : 01770615111**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penerimaan pajak restoran Kabupaten Kampar, mekanisme penerimaan pajak restoran sudah sesuai dengan prosedur, dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar. Pengamatan ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu metode wawancara dan metode observasi. Hasil yang ditemukan bahwa mekanisme penerimaan pajak restoran dilakukan oleh pegawai bidang pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2017-2019 hampir seluruhnya melampaui target pada tahun 2017 yaitu mencapai 129,44 % dan tahun 2019 yaitu mencapai 136,55 % .Namun prosedur yang dijalankan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kampar. Hal ini terjadi karena adanya kendala dalam penerimaan Pajak Restoran yaitu masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berpengaruh terhadap target yang telah ditetapkan dan kurangnya pemahaman soal prosedur yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Salah satu aspek penunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar khusus dari sektor Pajak Restoran perlu diperhatikan proses pemungutan nya dikarenakan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci** : Mekanisme Penerimaan Pajak Restoran

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Mekanisme Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada **Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Nurmatias** dan Ibunda **Ninik** tercinta yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anaknya Ihksan Novri Yasnik dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak cukup dalam peluh dan do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu dirindukan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakan- kebijakannya.
3. Ibuk Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Ibuk Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sektretaris Prodi dan dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
6. Kepada segenap jajaran staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.





8. Kepada teman-teman D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus untuk Afridho Trio Maulana yang telah motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah subbahanallahu wa ta'ala berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 13 November 2020  
Penulis

Ihksan Novri Yasnik

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

### COVER

### ABSTRAK ..... i

### KATA PENGANTAR ..... ii

### DAFTAR ISI ..... v

### DAFTAR GAMBAR ..... vii

### DAFTAR TABEL ..... viii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.5 Metode Analisa Data.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	10
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar .....	12
2.3 Uraian Tugas Pengawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar .....	13
2.4 Struktur Organisasi .....	16

### BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori .....	17
3.1.1 Pengertian Pajak .....	17
3.1.2 Fungsi Pajak.....	17
3.1.3 Jenis Pajak.....	19
3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
3.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	21
3.1.6 Syarat Pemungutan Pajak .....	21
3.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
3.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak .....	23
3.1.9 Pengertian Pajak Daerah.....	23
3.1.10 Pengertian Pajak Restoran .....	25
3.1.11 Dasar Hukum Pajak Restoran .....	26
3.1.12 Objek dan Subjek Pajak Restoran.....	27
3.1.13 Dasar Pengenaan Pajak Restoran .....	28





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

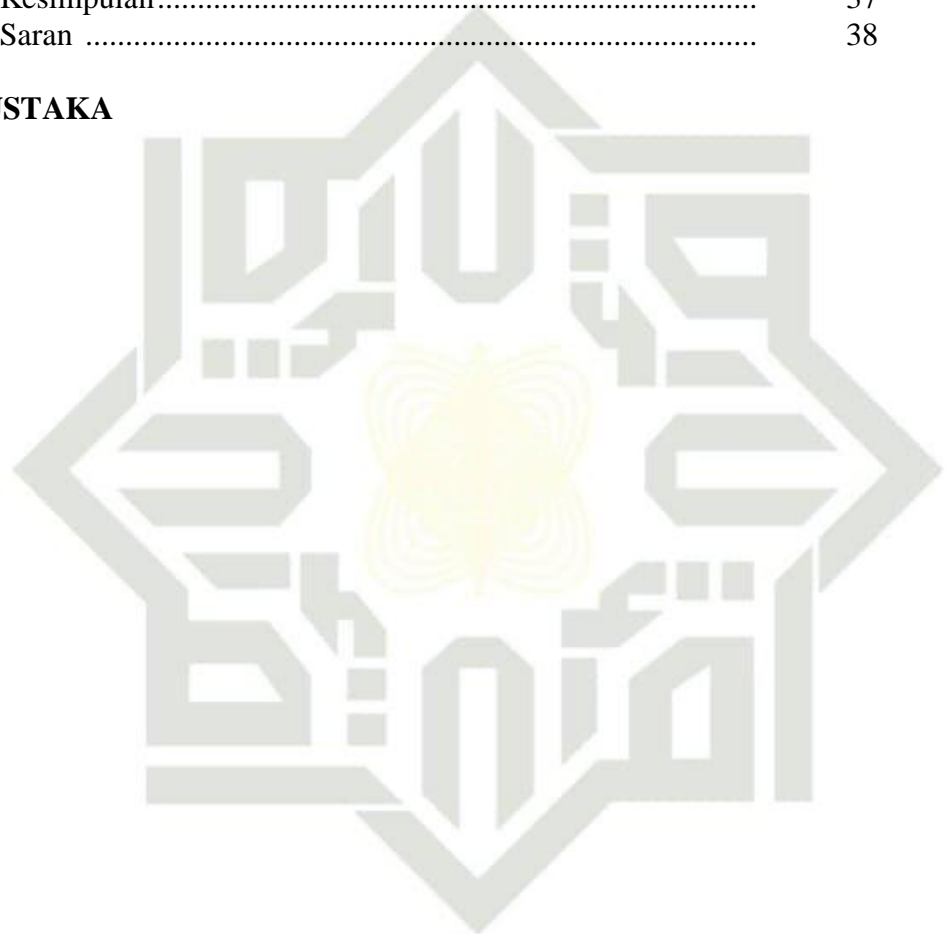
3.1.14 Cara Menghitung Pajak Restoran .....	29
3.1.15 Pengertian Pajak Dalam Islam .....	29
3.2 Tinjauan Praktek.....	32
3.2.1 Mekanisme Penerimaan Pajak Restoran .....	32
3.2.2 Prosedur Standar Penerimaan Pajak Restoran .....	34
3.2.3 Kontribusi Pajak Restoran .....	36

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran .....	38

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Kampar .....	16
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Yang Terdata .....	5
Tabel 3.1 : Target dan Realisasi Pajak Restoran.....	33
Tabel 3.2 : Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	36



UIN SUSKA RIAU





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, pembangunan berupa fisik maupun mental, hal ini tersebut ditunjukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata.

Pembangunan daerah adalah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi daerah . Dengan begitu pemerintah dituntut untuk dapat menggali kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber pembiayaan di daerah tersebut.

Dengan berlakunya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten atau kota, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya system pemerintah daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, setiap daerah yang otonomi memiliki kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Menurut Mardiasmo (2012;12) Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung



dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pemungutan yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai penerima kewajiban di bidang perpajakan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari pemungutan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, salah satu pungutan pajak daerah yaitu Pajak Restoran.

Penerimaan pajak daerah dapat membantu pembangunan di setiap daerah Kabupaten Kampar dalam proses wajib pajak harus patuh dalam membayar wewenangannya kepada pemerintah daerah. Semakin paham wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban dalam perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi tentu saja akan berkaitan dengan bertambah jumlah penerimaan pajak, yang sangat membantu untuk menopang keperluan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan sedangkan Pajak Kabupaten atau kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah

pajak atas pelayan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pungutan pajak restoran di Indonesia ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk di kembangkan sehingga sektor perdagangan dan penyediaan jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan.

Seiring berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kampar menjadikan restoran yang ada di satu sektor yang memilki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kabupetan Kampar. Pesatnya jumlah restoran akan mempengaruhi pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat di simpulkan bahwa Kabupaten Kampar memilki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Sejak diterbitnya peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Restoran, hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Keseluruhnya penerimaan pajak restoran daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Kampar yang diarahkan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu, penerimaan pajak restoran termasuk pendapatan asli daerah yang di kumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupetan Kampar. Sehingga setiap kecamatan dan instansi akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak Restoran di Kabupaten Kampar.

Pajak Restoran merupakan iuran atau pungutan yang wajib di bayar atas pelayanan yang diberikan restoran dengan membayar yang sifatnya dapat di paksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku sebesar 10% dan nilai jual objek pajak yang diharapkan dengan menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan yang di cita-citakan itu tercapai dengan baik.

Salah satu hal yang perlu dicermati bahwa besarnya peningkatan penerimaan pajak restoran untuk daerah Kabupaten Kampar dikarenakan banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pihak rumah makan, warung atau ampera dan kafering yang pada akhirnya menambah penerimaan Pajak Restoran. Apabila dilihat dari potensi pajaknya, pajak restoran di Kabupaten Kampar memiliki potensi yang cukup besar karena setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan objek-objek wisata, pembangunan rumah makan dan usaha-usaha lainnya. Jika pemungutan pajak restoran dapat dimaksimalkan untuk semua lokasi tersebut maka dapat membantu meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kamapr. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Yang Terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019**

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Perorangan Dan Badan		
		2017	2018	2019
1	Restoran	300	315	330
2	Rumah Makan	245	280	300
3	Kafe	185	200	215
4	Ampera	132	152	152
	Total Jumlah	862	947	997

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020.

Berdasarkan table 1.1 bahwa wajib pajak restoran yang telah terdata sudah cukup bagus karena dari penyataan yang diberikan tahun 2017 terdapat banyak 862 wajib pajak restoran yang terdiri dari 245 restoran, 300 rumah makan, 185 kafe, 132 ampera, tahun 2018 terdapat banyak 947 wajib pajak restoran yang terdiri dari 280 restoran, 315 rumah makan, 200 kafe dan 152 ampera, dan tahun 2019 terdapat banyak 997 wajib pajak restoran yang terdiri dari 300 restoran, 330 rumah makan, 215 kafe, 153 ampera.

Restoran itu sendiri mempunyai peranan yang sangat bagus dalam pendapatan di Kabupaten Kampar. Mengingat pentingnya Pajak Restoran bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul “ **Mekanisme Penerimaan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada pengamatan ini adalah :

Bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah mekanisme penerimaan pajak restoran sudah sesuai dengan prosedur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ?
- Bagaimana kontribusi[ pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah mekanisme penerimaan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme penerimaan pajak restoran yang sesuai dengan prosedur;
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
2. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran agar pendapatan semakin meningkat dengan, adanya administrasi yang baik dan informasi yang dapat dimengerti Masyarakat;





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi D3 Administrasi Perpajakan dalam memahami mekanisme penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

## **1.5 Metode Pengamatan**

### **1.5.1 Lokasi Pengamatan**

Penulisan tugas akhir ini memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Profesor M. Yamin, SH No 83 Bangkinang Kabupaten Kampar.

### **1.5.2 Waktu Pengamatan**

Penulisan ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2020.

### **1.5.3 Jenis Data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Dalam pembahasan ini data berupa jawaban hasil wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari beberapa referensi seperti dokumentasi, arsip dan data lain yang berkaitan dengan masalah pembahasan berupa profil instansi dan visi misi instansi. Sugiyono (2014:131)



#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada pengamatan ini adalah:

1. Metode Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang Mekanisme penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Metode Wawancara adalah penulis melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak Kantor Bapenda Kabupaten Kampar di bagian penagihan dan keberatan yang dianggap mampu memberikan data dan informasi bagi penyusunan penelitian ini.

#### 1.5.5 Metode Analisis Data

1. Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kuantitatif yaitu teknik analisis data berupa statistik yang berbentuk angka.
2. Data penulis diperoleh juga dari dokumen, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan, selanjutnya dianalisis dan dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **BAB I PENDAHULUAN**

Didalam Bab ini di uraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, metode analisi data, dan sistematika penulis.

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Bapenda Kabupaten Kampar, Visi dan misi Bapenda Kabupaten Kampar, struktur organisasi Bapenda Kabupaten Kampar, dan tugas pokok setiap seksi/unit kerja.

## **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRATEK**

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, pengetahuan pajak daerah, pengertian pajak restoran, dasar hukum pajak restoran, objek dan subjek pajak restoran, dasar pengenaan pajak restoran, tarif pajak restoran, pemungutan pajak restoran, pajak dalam Islam.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah Kemukakan dari beberapa Saran yang menjadi bahan masukan yang diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 312/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi



e. Seksi IPEDA

f. Seksi Pendapatan Lain-lain

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya

Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember

1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota

Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

d. Seksi Penetapan

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

f. Seksi Penagihan

Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota

Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

Pada Bulan Januari 2017 dirubah lagi menjadi (BAPENDA) Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Sampai Sekarang.

## 2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai Visi dan Misi yang digunakan dalam membangun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang lebih baik. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu **“Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”**.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut maka disusunlah Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan sumber daya manusia yang aparatur berkualitas.
- b. Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah .
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya selaku Wajib Pajak.

### 2.3 Uraian Tugas Pengawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

#### A. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah memimpin dan mempunyai tugas pokok yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah.

#### B. Sekretariat

Sekretariat yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub bagian program mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bagian Program dipimpin Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub oleh mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Program dipimpin Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Bagian Sekretariat terdiri dari beberapa sub dan fungsinya, yaitu :

a) **Bidang Perencanaan dan Penetapan**

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasikan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan, penagihan dan keberatan, pengelolaan, pengembangan dan pelaporan. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisi/ kajian terhadap bahan yang diajukan dari bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi terdiri dari :

- Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- Kepala Seksi Penghitungan dan Penetapan;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan.

#### b) **Bidang Penagihan Dan Keberatan**

Bidang penagihan dan keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah pertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasi, perumusan, evaluasi. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisi/ kajian terhadap bahan yang diajukan dari bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi terdiri dari :

1. Kepala Seksi Penagihan
2. Kepala Seksi Keberatan

#### c) **Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan**

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada pertanggung jawaba kepada Kepala Badan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan melaksanakan penyusunan program kerja, menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasi, evaluasi, mengumpulkan data dan pelaporan dibidang pengelolaan dana transfer, pengembangan potensi pendapatan, dan pelaporan. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisi/ kajian terhadap bahan yang diajukan dari bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Dana Transfer;

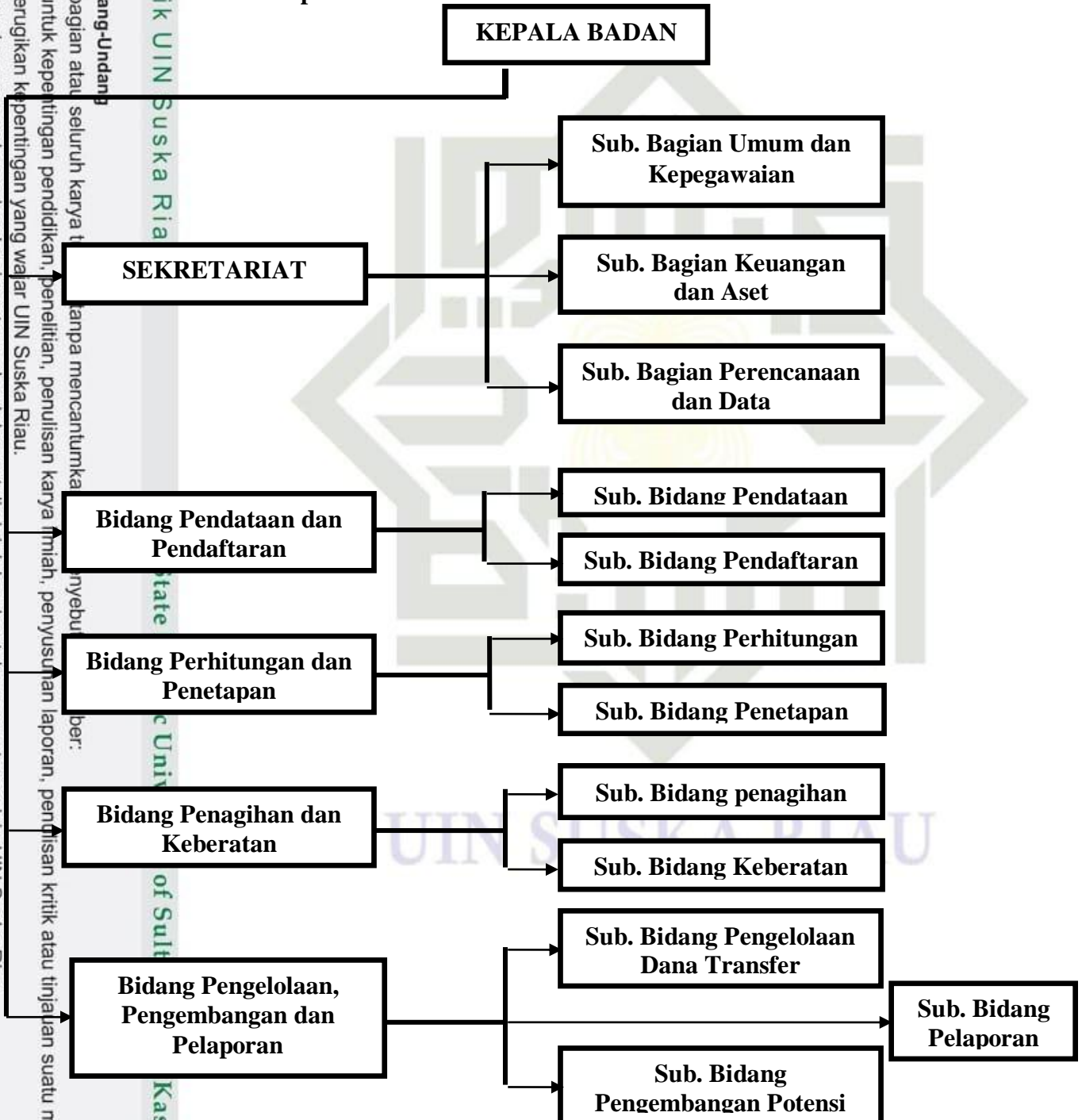




2. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan;
- Kepala Seksi Pelaporan.

## 2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas dalam bab sebelum nya, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Mekanisme penerimaan pajak restoran badan pendapatan daerah kabupaten Kampar sudah sangat berjalan dengan baik. beberapa tata cara yang diterapkan bapenda sudah terlaksana, dan wajib pajak sudah memahami dalam membayar pajak dan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku.
2. Prosedur penerimaan pajak Restoran yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu dengan menggunakan pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan pajak, pembayaran pajak, penagihan pajak ,dan pembukuan dan pelaporan.
3. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 1,1 %, tahun 2018 sebesar 1,7% dan tahun 2019 sebesar 2%.

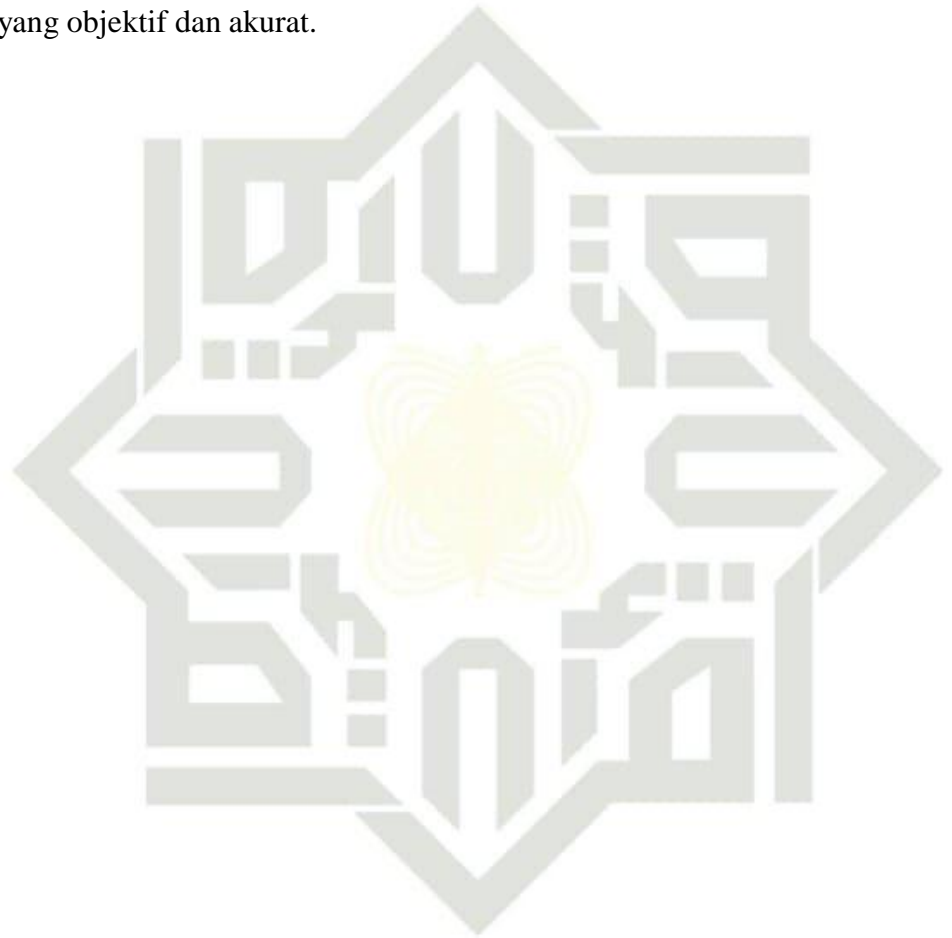
#### 4.2 Saran

Dengan harapan agar penerimaan pajak restoran dapat lebih baik lagi, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan menambah wawasan pajak , kesadaran membayar pajak dan peduli pajak demi pembangunan daerah yang maju serta mempunyai kualitas yang tinggi.



2. Peningkatan penerimaan pajak restoran pada kantor badan pendapatan daerah Kabupaten Kampar perlu dilakukan evaluasi terhadap potensi yang ada.
3. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, 2019. Solo PT. Tiga serangkai putra mandiri.
- Adrian. Sutedi. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhari, 2010. *Perpajakan I*. Pekanbaru : UR Press
- Devano, Sony dan Rahayu Kurnia Siti, 2009 *Perpajakan*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul, 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan edisi revisi 2018*. Yogyakarta: CV. Andi Offest
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang *Pajak Restoran*.
- Sulemana Dede, 2019. *Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi*. Jakarta Timur : Jurnal Moneter
- Syafii, 2012. *Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu*
- Siahaan Mariot Pahala, 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja wali Pers,
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan Indoneia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 Tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H e x c o n t a i n i n g U N S u s k a R i a u  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BIOGRAFI PENULIS



Nama penulis IHSAN NOVRI YASNIK penulis lahir Di Duri putra dari Bapak Nurmatias dan Ibu Ninik. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Penulis saat ini bertempat tinggal di Duri, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kelurahan Duri Timur, RW 3 RT 3. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu bermula dari SDN 044 Duri Timur, Kemudian

melanjutkan studi di SMPN 03 Mandau Kemudian melanjutkan studi di SMAS IT MUTIARA Pinggir dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jalur MANDIRI pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Sampai penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.

Dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Pendidikan D3 Administrasi Perpajakan dengan resmi menyandang gelar Ahli Madya. Penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR”**.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU